

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa *agency theory* berkaitan dengan kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*). *Agency theory* melibatkan kerjasama antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* memberikan tugas kepada *agent* dalam mengatur dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Menurut Lestari dan Chariri (2007) didalam teori keagenan terdapat 3 macam hubungan, yaitu hubungan antara manajer dengan pemilik (*bonus plan hypothesis*), hubungan antara manajer dengan kreditor (*debt/equity hypothesis*), dan hubungan antara manajer dengan pemerintah (*political cost hypothesis*).

Potensi masalah yang muncul dari *agency theory* adalah asimetri informasi dan konflik kepentingan. *Agency theory* menjadi dasar dalam *voluntary disclosure* untuk mengurangi asimetri informasi dari konflik antara *principal* dan *agent* serta antara perusahaan dan *stakeholder*. Menurut Bruggen *et al.* (2009) akibat dari asimetri informasi yang terjadi adalah adanya misalokasi modal seperti pengangguran dan penurunan produktivitas. Dari uraian tersebut, pengungkapan dapat dijadikan kontrol

kinerja *agent* yaitu dengan *agent* melakukan *voluntary disclosure* seperti *intellectual capital disclosure*.

Struktur *corporate governance* dapat mengawasi perusahaan agar bertindak sesuai keinginan prinsipal dalam melakukan pengungkapan informasi salah satunya *intellectual capital*. Setelah melakukan pengawasan terhadap *intellectual capital* perusahaan, maka akan diperoleh informasi mengenai bagaimana perusahaan menggunakan *intellectual capital* dalam mengelola bisnisnya dan meminimalisir *fraud* sehingga tercapai transparansi dan akuntabilitas.

2. Signaling Theory

Signaling theory merupakan tanda yang diberikan perusahaan berupa *signal* kepada *stakeholder*. Widarjo (2011) menjelaskan bahwa *signaling theory* mengindikasikan bahwa melalui pengungkapan dalam laporan keuangan, perusahaan berusaha menunjukkan *signal* berupa informasi positif kepada *stakeholder*. *Signaling theory* muncul karena adanya asimetri informasi dalam pasar (Morris, 1987). Asimetri informasi adalah keadaan dimana terjadi perbedaan informasi antara *stakeholder* dengan manajemen dari segi *financial* maupun *non-financial* dalam perusahaan. Berdasarkan teori ini, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder*.

Informasi merupakan hal sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dimana melalui informasi dapat memberikan gambaran tentang

keadaan yang terjadi di masa lalu, saat ini, maupun dimasa yang akan datang. Karena informasi merupakan hal yang sangat penting, maka perusahaan memiliki motivasi untuk memberikan informasi positif kepada *stakeholder*, informasi positif tersebut dapat diperoleh melalui pengungkapan secara sukarela yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan tersebut dapat berupa pengungkapan *intellectual capital* (IC) pada laporan keuangan.

Informasi dalam pengungkapan IC terdiri dari strategi perusahaan, kualitas SDM, serta segala hal yang menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga informasi tersebut dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi. *Signal* positif berupa pengungkapan IC yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, diharapkan mendapat respon positif dari pasar sehingga dapat memberikan keuntungan kompetitif dan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan.

3. *Resources Based Theory*

Resources based theory merupakan teori yang menyatakan bahwa sumber daya yang ada didalam perusahaan adalah modal untuk membentuk kapabilitas perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan serta dapat memberikan strategi untuk perusahaan dimasa yang akan datang (Grant, 1991). Suatu perusahaan dinilai unggul apabila memiliki sumber daya yang unggul pula. Sumber daya yang unggul adalah sumber daya yang langka dan sulit untuk ditiru oleh pesaing serta tidak

dapat tergantikan (Barney, 1991). Dari hal tersebut, muncullah asumsi *resources based theory* yaitu bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan.

Suatu perusahaan akan memiliki keunggulan dalam melakukan persaingan di pasar apabila dapat memanfaatkan aset-aset strategis seperti *tangible asset* dan *intangible asset* termasuk IC secara efektif dan efisien (Belkaoui, 2003). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu perusahaan akan diperoleh dari sumber daya yang ada didalamnya yaitu *tangible asset* maupun *intangible asset*, sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dibanding perusahaan lainnya. IC merupakan sumber daya yang ada didalam perusahaan sehingga dalam pemanfaatan IC, perusahaan akan memiliki nilai tambah dibanding perusahaan lainnya serta berimbas pada pemuas kepentingan yang dimiliki oleh *stakeholder* perusahaan.

4. Stakeholder Theory

Istilah *stakeholder* yang sering terdapat dalam penelitian dikemukakan oleh Freeman dan Reed (1983) yang menyatakan bahwa *stakeholder* adalah sebagai berikut:

“Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an organization’s objectives, or is affected by achievement of an organization’s objectives.”

Stakeholder theory adalah sekelompok orang atau individu dimana orang atau individu tersebut dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. *Stakeholder* terdiri dari pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah dan masyarakat. *Stakeholder* dijadikan perusahaan sebagai alat pertimbangan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Sirojudin dan Nazaruddin (2014) menyatakan bahwa untuk memenuhi yang diharapkan *stakeholder*, perusahaan secara sukarela akan memberikan informasi mengenai sosial, lingkungan, intelektual perusahaan diatas permintaan wajib.

Menurut teori ini, manajemen dalam perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan perusahaannya. Hal ini terjadi karena manajemen berusaha melakukan yang terbaik dalam kinerjanya untuk mencapai keberhasilan usahanya dan meminimalisir kerugaian yang akan ditanggung oleh *stakeholder* yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya cukup melakukan kinerja yang baik, akan tetapi untuk menyampaikan hasil kinerjanya diperlukan pengungkapan yang lebih luas selain pengungkapan dalam laporan keuangan yaitu dengan melakukan pengungkapan pada *intangible asset* yaitu *intellectual capital*.

5. *Intellectual Capital Disclosure*

Menurut Bruggen *et al.* (2009) alasan perusahaan melakukan *intellectual capital disclosure* adalah untuk meminimalisir tingkat asimetri informasi sehingga dapat menekan biaya modal. *Intellectual capital disclosure* dapat meningkatkan nilai relevansi laporan keuangan. Adapun peningkatan nilai relevansi laporan keuangan adalah sebagai berikut : (1) akibat dari gagalnya menyampaikan informasi secara relevan yaitu terjadinya kemerosotan posisi keuangan perusahaan dan dapat menurunkan daya saing perusahaan, (2) *investor* menilai secara akurat nilai perusahaan untuk alokasi sumber daya dengan menggunakan laporan keuangan yang tidak melaporkan *intellectual capital*, (3) manajer sulit untuk menentukan relevansi *intangible asset* yang diperlukan untuk operasi perusahaan.

Intellectual capital disclosure dapat menciptakan kepercayaan dengan karyawan dan *stakeholder*, serta dapat mencegah terjadinya rumor dan kerugian pada perusahaan. Bruggen *et al.*, (2009) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan strategi jangka panjang yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan demi terciptanya komitmen *stakeholder* yang lebih tinggi. Pengungkapan informasi melalui *intellectual capital* dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran. Perusahaan dapat memberikan bukti berupa nilai-nilai yang diterapkan serta kemampuan dalam menciptakan kekayaan sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Intellectual capital disclosure di Indonesia masih bersifat *voluntary* karena belum diatur secara detail dalam kerangka kerja akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, terdapat metode pengukuran baru dan model pelaporan IC yaitu *IC index* dapat mengatasi masalah standar akuntansi keuangan tradisional dalam pengukuran IC. *Intellectual capital disclosure* dituangkan dalam informasi tambahan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan. Untuk mengatasi masalah yang ada dalam hubungan keagenan seperti asimetri informasi solusinya adalah melakukan *intellectual capital disclosure*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya agen timbul dari oportunistik manajernya, sehingga mereka termotivasi untuk mengungkapkan informasi secara sukarela yaitu informasi IC untuk mengurangi biaya agensi tersebut.

6. Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *corporate governance* adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan *investor* yang melibatkan satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dan juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan, sarana mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja.

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *good corporate governance* diatur dalam Keputusan Menteri BUMN

nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan peraturan tersebut, *corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Di Indonesia *proxy* dari *corporate governance* diantaranya adalah pemegang saham, komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan *stakeholder* lainnya. Dari beberapa item *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa struktur *corporate governance* adalah bagian dari organ dimana terdapat fungsi kepengurusan yang menjaga dan menjalankan perusahaan. Struktur *corporate governance* yang akan diuji dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh bagaimana *corporate governance* tersebut bekerja dalam perusahaan (Ashurov, 2010). Sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* tetapi jika mekanisme tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi

kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai (Herwidayatmo dalam Utami dkk, 2012).

a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan aturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisaris terdiri dari satu orang atau bisa juga lebih. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang disebut “majelis”. Pengangkatan maupun pemberhentian dewan komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota dewan komisaris dalam mengatasi proses *corporate governance* untuk memastikan bahwa manajemen membudayakan *corporate governance*. Rapat yang diadakan diharapkan mampu membantu dewan komisaris dalam mengawasi kerja manajemen untuk melancarkan pengungkapan secara besar-besaran pada laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi bagi pihak *investor*. Dalam pelaksanaan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Rapat komisaris

dipimpin oleh komisaris utama dan keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

c. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang bekerja pada perusahaan untuk membantu melakukan monitoring kinerja manajer perusahaan sehingga dapat menghindari tingkat kecurangan dalam menerbitkan laporan keuangan yang merugikan para pengguna laporan keuangan. Jumlah anggota komite audit paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

d. Jumlah Rapat Komite Audit

Dewan komite audit memiliki fungsi untuk mendampingi dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan kinerja perusahaan dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen resiko, serta fungsi audit internal dan eksternal. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Rapat komite audit dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota yang hadir pada rapat adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah semua anggota. Keputusan dari rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

e. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan skala saham biasa yang dimiliki oleh para pemegang keputusan dalam manajemen perusahaan misalnya direksi atau dewan komisaris. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan yang memiliki peran pengambilan keputusan dalam perusahaan dapat diukur berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang ada. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham.

f. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki institusi atau lembaga yang menginvestasikan dananya ke perusahaan. Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan dalam eksternal institusi, lembaga atau yang lainnya. Kepemilikan institusional dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kemampuan dimiliki pada kepemilikan institusional yaitu untuk mengendalikan berbagai pihak terutama bagi manajemen melalui prosedur pemantauan.

g. *Global Industry Classification Standard (GICS)*

Global Industry Classification Standard (GICS) adalah sebuah taksonomi industri yang dikembangkan oleh *Morgan Stanley Capital International (MSCI)* dan *S&P* yang digunakan oleh komunitas keuangan global (Pratama, 2016). Berdasarkan *Intellectual Capital intensity*, GICS mengelompokkan industri menjadi 2, yaitu *High-IC intensive industries* dan *Low-IC intensive industries*. *High-IC intensive industries* adalah kelompok industri yang mampu memanfaatkan aset intelektualnya dengan baik sehingga tercipta keunggulan kompetitif perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang termasuk *High-IC Intensive Industry* memiliki tingkat pengungkapan modal intelektualnya yang lebih tinggi daripada perusahaan *Low-IC Intensive Industry*.

Contoh industri *High-IC intensive industries* adalah *automotive and allied products, cables, construction*, dan contoh industri *Low-IC Intensive Industry* adalah *adhesive agriculture forestry and fishing, food and beverages*. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan dengan *High-IC Intensive Industry* akan melakukan *intellectual capital disclosure* lebih banyak sehingga upaya untuk memuaskan kebutuhan *stakeholder* akan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan.

Dasar Klasifikasi Perusahaan dalam GICS dapat dilihat pada Tabel

2.1. dibawah ini:

Tabel 2.1.
Dasar Klasifikasi Perusahaan dalam IC Intensity Menurut GICS

<i>High-IC Intensive Industry</i>	<i>Low-IC Intensive Industry</i>
<i>Automobile and Components</i>	<i>Commercial Services and Supplies</i>
<i>Banks</i>	<i>Commercial Durable and Apparels</i>
<i>Capital Goods</i>	<i>Consumer Services</i>
<i>Commercial Services and Supplies</i>	<i>Energy</i>
<i>Consumer Services</i>	<i>Food, Beverage and Tobacco</i>
<i>Diversified Financials</i>	<i>Food, Staples and Retailing</i>
<i>Health Care Equipment and Services</i>	<i>Materials</i>
<i>Insurance</i>	<i>Retail</i>
<i>Media</i>	<i>Transportation</i>
<i>Pharmaceutical, Biotechnology and Life Science</i>	<i>Utilities</i>
<i>Real Estate</i>	
<i>Semi Conductors</i>	
<i>Software and Services</i>	
<i>Technology, Hardware and Equipment</i>	
<i>Telecommunication Services</i>	

Sumber: Global Industry Classification Standard dalam Whiting dan Woodcock (2009)

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Dalam teori agensi, dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas melakukan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Asimetri informasi yang akan terjadi berdampak pada misalokasi modal, sehingga dapat menurunkan produktivitas perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan, maka kinerja pengawasan dan pengendalian menjadi lebih baik dan efektif. Besarnya jumlah anggota dewan komisaris mampu meminimalisasi adanya *agency cost* dan meningkatkan *intellectual capital disclosure*. *Agency cost* timbul dari oportunistik manajer, sehingga perlu dilakukan pengungkapan informasi *intellectual capital* secara sukarela untuk mengurangi asimetri informasi sehingga dapat mengurangi *agency cost* tersebut.

Cerbioni dan Parbonetti (2007) menyatakan bahwa di beberapa negara, jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja yang dihasilkan. Adapun dampak tersebut adalah : (1) timbul masalah komunikasi dan koordinasi sebagai akibat dari besarnya jumlah dewan komisaris, (2) timbul masalah *agency* dan berkurangnya kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Abeysekera

(2008). Hasil penelitian keduanya membuktikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih besar pula karena adanya tekanan dewan dalam jumlah besar terhadap pihak manajemen.

Penelitian mengenai jumlah anggota dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure* telah dilakukan oleh Pratama (2016) menemukan adanya pengaruh positif antara jumlah anggota dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dewan komisaris mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan berdampak pada pengungkapan yang lebih besar. Adanya tekanan dewan dalam jumlah besar terhadap pihak manajemen mampu mempengaruhi kinerja manajemen secara maksimal termasuk mengenai pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sembiring (2005) menemukan adanya pengaruh positif antara jumlah anggota dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure*. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat sehingga mampu meningkatkan pengungkapan modal intelektual. Tekanan tinggi yang diberikan oleh dewan komisaris akan membuat manajemen menyajikan informasi termasuk mengenai *intellectual capital disclosure* khususnya strategi kompetitif perusahaan (Abeysekera, 2008).

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian *intern* tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitoring tindakan manajemen puncak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Purwanto (2012) mendukung teori agensi dengan menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris yang besar mampu menekan kinerja manajemen sehingga dapat berekerja secara maksimal dan mampu mempengaruhi *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H₁: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

2. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Tingkat intensitas diadakannya rapat dewan komisaris, diharapkan mampu meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian. Dengan seringnya diadakan rapat dewan komisaris dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian menjadi lebih baik dan efektif. Mekanisme tersebut akan memberikan dorongan dan tekanan bagi manajer untuk mengungkapkan informasi mengenai *intellectual capital* dengan baik dan relevan sehingga dapat meningkatkan *intellectual capital disclosure*. Semakin besar jumlah rapat dewan komisaris suatu perusahaan, maka semakin besar terjadinya *intellectual capital disclosure*. Hal tersebut sesuai dengan *resource based theory*, dimana pengungkapan modal intelektual

yang dilakukan akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan sebagai strategi untuk menarik minat investor. Rapat dewan komisaris menjadi media untuk menetapkan efektivitas mekanisme pengawasan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan.

Hasil penelitian mengenai jumlah rapat dewan komisaris terhadap *intellectual capital disclosure* memiliki pengaruh positif telah dilakukan oleh Cahya (2013). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan semakin besar jumlah rapat dewan komisaris maka semakin luas pengungkapan modal intelektual suatu perusahaan. Rapat dewan komisaris sebagai media untuk menetapkan efektivitas mekanisme pengawasan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Dengan sering diadakannya rapat dewan komisaris, maka dapat menjadi tekanan untuk manajer sehingga meningkatkan pengungkapan informasi modal intelektual dan pengendalian menjadi lebih efektif.

Siahaan dan Wahidahwati (2015) menemukan hasil jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Hal tersebut karena rapat dewan komisaris merupakan wadah yang tepat untuk mengkoordinasikan dan mengomunikasikan setiap aktivitas perusahaan sehingga dalam rapat dewan komisaris dapat mengambil keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan secara efektif.

Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Uzliawati (2015) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif

terhadap *intellectual capital disclosure*. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugasi untuk menjalankan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga terlaksananya akuntabilitas, maka semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris akan meningkatkan kinerja manajemen untuk melakukan *monitoring* sehingga dapat mendorong manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai *intellectual capital*. Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H₂: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

3. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan melakukan penelaahan informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Komite audit berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencegah tindakan kecurangan seperti menyajikan informasi yang tidak akurat dan relevan serta sebagai alat pengendali mekanisme *corporate governance* yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan *stakeholder theory*, terkait tugas

komite audit yang memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggung *stakeholder*. Manajer akan berusaha melakukan kinerjanya dengan baik, sehingga dapat meminimalisir kerugian dan juga akan mengungkapkan modal intelektual lebih luas untuk kepentingan *stakeholder*.

Komite audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya (Bapepam, 2012). Komite audit dalam hal ini akan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengawasi praktik *intellectual capital disclosure*. Semakin besar jumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan maka akan mempengaruhi pengungkapan informasi yang dilakukan. Jumlah anggota komite audit akan menghasilkan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang luas dan berkualitas.

Hasil penelitian mengenai jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* telah dilakukan oleh Arifah (2012). Dalam penelitian tersebut, komite audit memiliki tanggung jawab terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan yaitu meyakinkan kepentingan pemegang saham terlindungi dengan baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit maka semakin luas pula kuantitas dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*.

Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian Felo *et al.*, (2003) dan Li *et al.*, (2007) menyatakan adanya hubungan positif antara jumlah anggota komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*. Menurut penelitian Felo *et al.*, (2003) adanya pengaruh positif antara jumlah anggota komite audit terhadap *intellectual capital disclosure* dapat terjadi karena komite audit memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawasi praktik pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Li *et al.*, (2007) semakin besar jumlah anggota komite audit maka akan semakin luas pula pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H₃: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

4. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Komite audit mengadakan rapat untuk melakukan koordinasi, dimana pada rapat tersebut dapat mempertemukan berbagai anggota komite audit yang memiliki bermacam-macam keahlian. Koordinasi yang dilakukan dalam rapat komite audit membahas mengenai strategi dan evaluasi pelaksanaan tugas seperti pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, serta pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam *Agency theory*, pertemuan yang dilakukan komite audit akan menekankan adanya asimetri informasi. Hal tersebut karena sebuah rapat komite audit akan berdiskusi dengan auditor dan manajemen tentang evaluasi informasi yang perlu disampaikan kepada pengguna laporan, contohnya informasi tentang *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan. Komite audit yang memiliki lebih banyak waktu untuk bertemu dapat melakukan proses pemantauan pelaporan perusahaan yang lebih efisien. Semakin sering frekuensi rapat komite audit dilakukan, maka dapat meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif sehingga mampu mengurangi asimetri informasi serta mempengaruhi *intellectual capital disclosure*, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Penelitian mengenai jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* telah dilakukan oleh Li *et al.*, (2012). Penelitian tersebut menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengungkapan *intellectual capital* dan mampu mengurangi asimetri informasi. Dalam sebuah pertemuan, anggota komite audit akan berdiskusi tentang evaluasi informasi yang perlu disampaikan kepada pengguna laporan, contohnya informasi tentang modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin sering frekuensi dilakukan rapat komite audit, maka akan meningkatkan kinerja manajemen dalam melakukan pengawasan pelaporan informasi sehingga dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual.

Prameswari dan Sudarno (2014) menemukan adanya pengaruh positif antara jumlah rapat komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*. Pertemuan yang diselenggarakan komite audit dengan berbagai macam keahlian seringkali membahas mengenai strategi dan evaluasi pelaksanaan tugas seperti pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, serta pengawasan terhadap tata kelola perusahaan. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi pertemuan rapat yang dilakukan oleh komite audit maka dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani (2014) dan Wahyuni dan Rasmini (2016) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara jumlah rapat komite audit terhadap *intellectual capital disclosure*. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit maka akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan modal intelektual lebih besar pula. Hal tersebut dimungkinkan karena aktivitas yang dilakukan komite audit merupakan faktor penting dalam melakukan pengendalian internal terhadap manajemen dengan mengurangi asimetri informasi termasuk pengungkapan modal intelektual (Li *et al.*, 2008). Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H₄: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap masalah keagenan. Masalah utama keagenan adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham dengan manajer. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik antara pemilik saham dan manajer adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam *agency theory*, semakin besar informasi dimiliki manajemen sebagai pemilik perusahaan akan menurunkan *agency cost* yang digunakan untuk biaya pengawasan, sehingga meningkatkan pengungkapan *intellectual capital* lebih luas. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada suatu perusahaan, maka manajemen cenderung akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Manajer akan semakin produktif dalam meningkatkan nilai perusahaan karena mereka merasa memiliki dan mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan manajer dalam meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan mengungkapkan informasi mengenai *intellectual capital*. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan berupaya untuk mengungkapkan informasi tentang *intellectual capital* secara lebih rinci dalam rangka meningkatkan *image* perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial

yang rendah tingkat pengungkapan *intellectual capital* juga rendah karena mereka tidak merasa memiliki perusahaan dan tidak akan merasakan dampak dari kualitas laporan tahunan perusahaan.

Penelitian mengenai kepemilikan manajerial terhadap *intellectual capital disclosure* telah dilakukan oleh Saleh, *et al.*, (2008) menemukan hubungan positif antara kinerja perusahaan dan tingkat kepemilikan manajemen di perusahaan. Jika kepemilikan manajemen meningkat, maka manajemen akan lebih mau meningkatkan aktivitas penciptaan nilai yang membuat yang dapat meningkatkan manfaat kompetitif di masa depan. Dalam hal ini aktivitas tersebut akan meningkatkan kinerja pengawasan dan dapat meningkatkan pengungkapan *intellectual capital* di perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sheu *et al.*, (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal tersebut mengidentifikasi kepemilikan manajerial meningkat diikuti dengan peningkatan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin besar pula tingkat pengungkapan *intellectual capital* yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan dapat dijadikan daya tarik bagi *investor*.

Purwandari (2012) menemukan adanya pengaruh signifikan secara parsial antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka semakin besar informasi dimiliki oleh manajemen sebagai pemilik

perusahaan, sehingga menurunkan *agency cost* yang digunakan untuk biaya monitoring dan dapat meningkatkan pengungkapan yang lebih luas. Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini :

H₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan mendapatkan pengawasan yang besar juga dari *investor*. Menurut *signaling theory*, apabila kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tinggi, maka manajer akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* secara luas dengan maksud memberikan sinyal positif kepada *investor* institusional sehingga menaikkan nilai perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh pihak institusi maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Permanasari, 2010). Dengan kata lain perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan berupaya untuk mengungkapkan *intellectual capital* secara lebih lengkap dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer (Jensen dan Meckling 1976). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh

pihak *investor* institusional dalam memonitor setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Sedangkan perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang rendah, mengungkapkan *intellectual capital* rendah karena pengawasan dari pihak institusi juga semakin kecil.

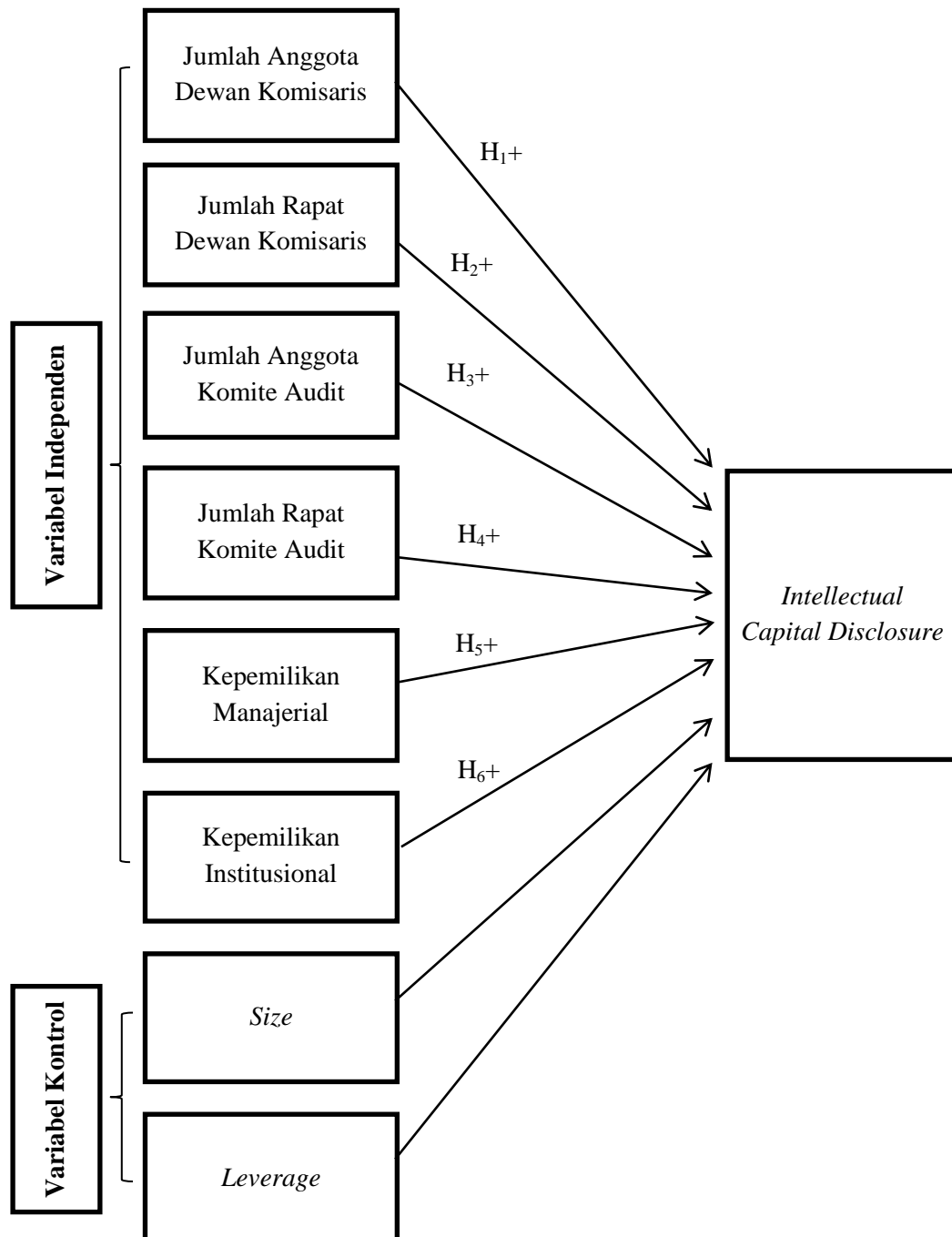
Penelitian mengenai kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* telah dilakukan oleh Siahaan dan Wahidahwati (2015). Dalam penelitian tersebut menemukan hasil bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar pula dari *investor*. Apabila kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tinggi, maka akan memotivasi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih besar termasuk *intellectual capital disclosure*. Pengungkapan informasi tersebut juga dapat memberikan sinyal positif bagi *investor* institusional sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan.

Dalam penelitian Purwandari (2012) menemukan adanya pengaruh positif secara parsial antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan laporan keuangan. Menurut penelitian tersebut, kepemilikan institusional akan mencoba mempengaruhi manajemen dalam mengelola urusan internal perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan maka akan mendesak manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi laporan keuangan yang lebih luas pula.

Investor institusi memiliki kekuatan untuk memonitor manajer dibandingkan dengan *investor* individu, karena pada umumnya *investor* institusi memiliki proporsi saham dalam jumlah yang lebih banyak. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak *investor* institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga perilaku *opportunistic* yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Semakin besar tingkat kepemilikan *investor* institusional dalam suatu bank dapat meningkatkan kinerja keuangan pada bank tersebut (Nugrahanti dan Novia 2012). Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini :

H₆: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

C. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Model Penelitian
Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap ICD